RENCANA KERJA TAHUN 2021



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta





0264-8224794 dpmptsp.purwakartakab.go.id



081809898111



O dpmptsp.purwakarta









BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk memilah dan memilih alternatifalternatif pilihan, kemudian menentukan alternatif mana yang paling tepat dalam
melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Perencanaan
pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan
jangka pendek (tahunan) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait lainnya dalam merumuskan arah kebijakan, strategi dan prioritas program dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan (Dadang Solihin, 2005).

Pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang sistematis dan akurat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah serta dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Perencanaan yang sistematis akan sangat membantu dalam proses kontrol, membantu mengantisipasi masalah sehingga jika ditemukan ketidaksesuaian bisa segera dielakukan evaluasi dengan baik, cepat dan jelas.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memerlukan suatu penyusunan perencanaan terlebih dahulu melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Dalam lingkup perangkat daerah, dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program Kepala daerah yaitu Rencana Strategis (Rensta) yang merupakan penjabaran konkrit dan bersifat operasional dari RPJMD sesuai dengan Tupoksi perangkat daerah yang bersangkutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Agar penyusunan rencana strategis termasuk perumusan program dan kegiatan di dalamnya terukur dengan sasaran yang jelas dan konkrit. Maka diperlukan dokumen perencanaan tahunan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan melakukan evaluasi atas kinerja perangkat daerah setiap tahunnya berupa Rencana Kerja perangkat daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) sehingga penyusunannya berpedoman pada Renstra SKPD serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang berfungsi menjabarkan, menerjemahkan serta mengoperasionalkan Renstra DPMPTSP 2018-2023 serta RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 ke dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun ke depan yang memuat potensi, peluang dan kendala yang ada dengan tetap memperhatikan keterpaduan dan keterkaitan antara perencanaan, penetapan program dan penganggaran dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- 18) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 19) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 21) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 22) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 186 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dimaksdukan sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Purwakarta selama satu tahun anggaran 2021 yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta sebagai bahan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 ini adalah untuk:

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP;
- 2) Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 3) Menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kab. Purwakarta
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kab. Purwakarta
- 2.3 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
- BAB III 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2020 dan Capaian Renstra DPMPTSP

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020 di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta berpedoman kepada Sasaran, indikator kinerja utama (IKU), program dan kegiatan yang tercantum pada dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2016 tentang tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 yaitu "Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif". Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta didukung oleh 2 (dua) Sasaran yaitu:

Sasaran Pertama,

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN.

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2021 adalah sebesar 60 Triliun.

Sasaran Kedua,

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2021 adalah sebesar 82,35.

Pada tahun 2021 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	КЕТ
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	60 Triliun	69,76 Triliun	Tercapai 116%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,35	85,59	Tercapai 104%

Sumber: LAKIP DPMPTSP, Tahun 2020.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 2 indikator yang diukur pada Tahun 2020, semuanya melebihi target, Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan ketercapaian sebesar 116% dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan ketercapaian sebesar 104%.

Pencapaian terhadap target kinerja sasaran sebagaimana telah disebutkan bukan berarti tanpa hambatan, adapun permasalahan dalam penanaman modal dan perijinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a) Data potensi investasi yang tersedia kurang memadai.
- b) Implementasi insentif dan fasilitasi penanaman modal belum terwujud.
- c) Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal.
- d) Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- e) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam bidang teknologi informasi dan teknis perizinan.
- f) SOP dan Standar pelayanan masih belum *up to date* sesuai dengan jumlah jenis layanan.
- g) Terkait dengan Tim Teknis yang mempunyai kewenangan atas penerbitan perizinan yang memerlukan rekomendasi, prosesnya masih di masing-masing perangkat daerah dan belum di delegasikan kepada Tim Teknis yang merupakan bagian dari DPMPTSP.

Permasalahan tersebut menjadi masukan serta acuan dalam penyusunan rencana kerja di Tahun 2021 ini sehingga dapat terakomodir dalam program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.

Sedangkan berdasarkan tingkat pencapaian Renja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta atas realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	pada	Kinerja RPJMD Tahun 2023 eriode RPJMD)		Capaian Kinerja nun 2019	Target C Tal	apaian Kinerja hun 2020		ian Kinerja Tahun 020		si Capaian Kinerja d Tahun Lalu 2020 (n-2)	Nilai Realisasi Kinerja	Hambatan / Permasalahan
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
2.18.0. 00.0.0 0.01.0 0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				60.509.983.83		3.790.441.312		9.585.216.000		9.061.107.154		12.851.548.466		
2.18	Penanaman Modal				60.509.983.83 6		3.790.441.312		9.585.216.000		9.061.107.154		12.851.548.466		
2.12.2. 12.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	1.023.162.379	100,00	1.023.162.379	0,00	0			100,00	1.023.162.379	SANGAT TINGGI	
2.12.2. 12.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	524.201.180	100,00	524.201.180	0,00	0			100,00	524.201.180	SANGAT TINGGI	
2.12.2. 12.01. 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	185.430.000	100,00	185.430.000	0,00	0			100,00	185.430.000	SANGAT TINGGI	
2.12.2. 12.01. 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	56.409.200	100,00	56.409.200	0,00	0			100,00	56.409.200	SANGAT TINGGI	
2.12.2. 12.01. 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran				8.711.426.000		0		8.711.426.000		8.337.253.056		8.337.253.056		

Kode		Indikator Kinerj Program (outcon		pada (Akhir P	Kinerja RPJMD Tahun 2023 eriode RPJMD)	Tai	Capaian Kinerja nun 2019		apaian Kinerja un 2020		an Kinerja Tahun 020		i Capaian Kinerja Tahun Lalu 2020 (n-2)	Nilai Realisasi Kinerja	Hambatan / Permasalahan
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		1 Persentase Pegawai Ya Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	93,00		0,00		93		93,00		93,00		SANGAT TINGGI	
		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tan dan Sarana Prasarana k		90,00		0,00		90,00		90,00		90,00		SANGAT TINGGI	
		3 Persentase Sarana dan Prasarana I Kondisi Baik		85,00		0,00		85,00		85,00		85,00		SANGAT TINGGI	
		4 Persentase Kerja Yang Mendapatka Pelayanan Administrasi Perkantorar		85,00		0,00		85,00		85,00		85,00		SANGAT TINGGI	
		5 Persentase Perencanaa Pelaporan Capaian kin dan Keuang Yang Tepat Waktu dan Sesuai Pera Perundang- undangan	erja an	90,00		0,00		90,00		90,00		90,00		SANGAT TINGGI	
		6 Persentase Ketersediaa Data Kinerja		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		SANGAT TINGGI	
2.12.2. 12.01. 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1 Jumlah Buk Promosi Pol Unggulan D	Set ensi	1,00	798.129.709	1,00	798.129.709	0,00	0			1,00	798.129.709	SANGAT TINGGI	
		2 Jumlah Buk Peluang Pol Investasi		1,00		1,00		0,00				1,00		SANGAT TINGGI	

Kode	Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		dikator Kinerja gram (outcome)	Satuan	(Akhir Pe	Kinerja RPJMD Fahun 2023 riode RPJMD)	Tah	Capaian Kinerja un 2019	Target C	apaian Kinerja nun 2020		an Kinerja Tahun 120	Realisas RKPD s/d	i Capaian Kinerja I Tahun Lalu 2020 (n-2)	Nilai Realisasi Kinerja	Hambatan / Permasalahan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		3	Jumlah peran Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri	Event	3,00		3,00		0,00				3,00		SANGAT TINGGI	
2.12.2. 12.01. 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					418.305.094		418.305.094		0				418.305.094		
		1	Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	90,00		90,00		0,00				90,00		SANGAT TINGGI	
		2	Jumlah Dokumen Data dan Laporan Investasi Yang Akurat	Jumlah	1,00		1,00		0,00				1,00		SANGAT TINGGI	
			Prosentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen	10,16		10,16		0,00				10,16		SANGAT TINGGI	
2.12.2. 12.01. 18	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan					784.803.750		784.803.750		0				784.803.750		
		1	Persentase Kepastian dan Ketepatan Biaya Pelayanan Perzinan	Persen	100,00		100,00		0,00				100,00		SANGAT TINGGI	
		2	Persentase Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80,00		80,00		0,00				80,00		SANGAT TINGGI	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		likator Kinerja _I ram (outcome)	Satuan	pada ⁻ (Akhir Pe	Kinerja RPJMD Fahun 2023 rriode RPJMD)	Realisasi (Tal	Capaian Kinerja nun 2019	Target C	apaian Kinerja nun 2020		an Kinerja Tahun 120	Realisas RKPD s/d	i Capaian Kinerja I Tahun Lalu 2020 (n-2)	Nilai Realisasi Kinerja	Hambatan / Permasalahan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		3	Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan	Persen	95,00		95,00		0,00				95,00		SANGAT TINGGI	
		4	Persentase Target Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perjinan	Persen	100,00		100,00		0,00				100,00		SANGAT TINGGI	
			Persentase Peningkatan Sistem Informasi dan Pengembangan Database Pelayanan Perjinan	Persen	100,00		100,00		0,00				100,00		SANGAT TINGGI	
2.12.2. 12.01. 19	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal					42.000.000		0		42.000.000		36.862.000		36.862.000		
		1	Jumlah Buku Promosi Investasi	Buku	3,00		0,00		3,00		1,00		1,00		SANGAT RENDAH	Refocusing Anggaran
		2	Jumlah Keikutsertaan Pada Pameran Investasi	Event	11,00		0,00		11,00		1,00		1,00		SANGAT RENDAH	Terhambatnya pelaksanaan koordinasi dan perjalanan dinas dikarenakan dalam kondisi Pandemi Covid- 19
2.12.2. 12.01. 20	Program Perbaikan Iklim Investasi					280.000.000		0		280.000.000		218.710.300		218.710.300		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		dikator Kinerja gram (outcome)	Satuan	pada	Kinerja RPJMD Tahun 2023 eriode RPJMD)		Capaian Kinerja nun 2019		apaian Kinerja hun 2020		an Kinerja Tahun 020		i Capaian Kinerja I Tahun Lalu 2020 (n-2)	Nilai Realisasi Kinerja	Hambatan / Permasalahan
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		1	Persentase Perusahaan PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Persen	100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		SANGAT TINGGI	
		2	Persentase Perusahaan Yang Mendapat Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		SANGAT TINGGI	
		3	Persentase Pengaduan Perizinan	Persen	100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		SANGAT TINGGI	
		4	Peningkatan Nilai IKM	Persen	80,75		0,00		80,75		85,59		85,59		MELAMPA UI	
2.12.2. 12.01. 21	Program Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu		Persentase Jumlah Izin Yang Dapat Diselesaikan	Persen	80,00	246.790.000	0,00	0	80,00	246.790.000	80,00	183.773.798	80,00	183.773.798	SANGAT TINGGI	
2.12.2. 12.01. 22	Program Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi		Persentase Kesesuaian Regulasi PTSP Pusat dan Daerah	Persen	100,00	305.000.000	0,00	0	100,00	305.000.000	100,00	284.508.000	100,00	284.508.000	SANGAT TINGGI	

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil dari evaluasi kinerja dan penilaian mandiri lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2020, maka terdapat isu-isu strategis yang dapat diamati terkait dengan manfaat dan pengaruhnya di masa yang akan datang terhadap peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, antara lain sebagai berikut :

- Realisasi investasi PMA yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PMDN;
- 2. Gap yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
- 3. Potensi/Peluang investasi belum memiliki *Feasibility Study* (FS);
- 4. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 5. Belum adanya kebijakan insentif bagi penanam modal di Kabupaten Purwakarta;
- 6. Digitalisasi promosi investasi Kabupaten Purwakarta;
- 7. Pelayanan perizinan secara online dan terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik;
- 8. Minimnya keterikatan pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan;
- 9. Sinkronisasi regulasi perizinan antara Pusat dan Daerah.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2021 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Pada tahun 2021 program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mengalami perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta serta dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023, yang kemudian akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Purwakarta sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2021. Berikut ini adalah tabel review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Purwakarta

		Rancan	gan Awal RKPD				Hasil A	Analisis Kebutuhan			
No.	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	1 Tahun Anggaran	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	1 Tahun Anggaran	50.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	1 Tahun Anggaran	15.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	1 Tahun Anggaran	15.000.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah dan pelaporan lainnya	1 Tahun Anggaran	10.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah dan pelaporan lainnya	1 Tahun Anggaran	10.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas potensi dan kompetensi pegawai	1 Tahun Anggaran	400.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas potensi dan kompetensi pegawai	1 Tahun Anggaran	400.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas pemenuhan	1 Tahun Anggaran	600.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purwakarta	Meningkatnya kualitas pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun Anggaran	600.000.000	

		Rancan	gan Awal RKPD				Hasil A	nalisis Kebutuhan			
No.	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
			administrasi umum								
			perangkat daerah								
	Pengadaan Barang Milik Daerah		Meningkatnya kualitas	1 Tahun		Pengadaan Barang Milik Daerah		Meningkatnya kualitas	1 Tahun		
6	Penunjang Urusan Pemerintah	Purwakarta	pengadaan barang	Anggaran	200.000.000	Penunjang Urusan Pemerintah	Purwakarta	pengadaan barang milik	Anggaran	200.000.000	
	Daerah		milik daerah	, 119901011	200.000.000	Daerah		daerah	, anggaran	200.000.000	
			Terlaksananya					Terlaksananya kegiatan			
7		Purwakarta	kegiatan pelayanan	1 Tahun			Purwakarta	pelayanan penunjang	1 Tahun		
	Penyediaan Jasa Penunjang		penunjang urusan	Anggaran	2.300.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang		urusan	Anggaran	2.300.000.000	
	Urusan Pemerintahan Daerah		perkantoran			Urusan Pemerintahan Daerah		perkantoran			
	Pemeliharaan Barang Milik		Terlaksananya	1 Tahun		Pemeliharaan Barang Milik		Terlaksananya kegiatan	1 Tahun		
8	Daerah Penunjang Urusan	Purwakarta	kegiatan pemeliharaan	Anggaran	1.500.000.000	Daerah Penunjang Urusan	Purwakarta	pemeliharaan barang	Anggaran	1.500.000.000	
	Pemerintah Daerah		barang milik daerah			Pemerintah Daerah		milik daerah			
II	PROGRAM PENGEMBANGAN					PROGRAM PENGEMBANGAN					
	IKLIM PENANAMAN MODAL					IKLIM PENANAMAN MODAL					
	Penetapan Pemberian		Maninalista in astroni			Penetapan Pemberian		Maninalista a nataoni			
1	Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang	Purwakarta	Meningkatnya potensi investasi penanaman	1 Tahun		Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang	Purwakarta	Meningkatnya potensi investasi penanaman	1 Tahun		
'	menjadi Kewenangan Daerah	Fulwakaita	modal di Kabupaten	Anggaran	350.000.000	menjadi Kewenangan Daerah	Fulwakaita	modal di Kabupaten	Anggaran	350.000.000	
	Kabupaten/Kota		Purwakarta			Kabupaten/Kota		Purwakarta			
	Trabapatori/Trota		Meningkatnya potensi			Trabapatori i Traba		Meningkatnya potensi			
			investasi penanaman	1 Tahun				investasi penanaman	1 Tahun		
2	Pembuatan Peta Potensi	Purwakarta	modal di Kabupaten	Anggaran	75.000.000	Pembuatan Peta Potensi	Purwakarta	modal di Kabupaten	Anggaran	75.000.000	
	Investasi Kabupaten/Kota		Purwakarta			Investasi Kabupaten/Kota		Purwakarta			
	PROGRAM PROMOSI					PROGRAM PROMOSI					
III	PENANAMAN MODAL					PENANAMAN MODAL					

		Rancan	gan Awal RKPD				Hasil A	nalisis Kebutuhan			
No.	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal	1 Tahun Anggaran	150.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal	1 Tahun Anggaran	150.000.000	
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
1	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Tahun Anggaran	350.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Tahun Anggaran	350.000.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Purwakarta	1 Tahun Anggaran	400.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya realisasi penanaman modal di Kabupaten Purwakarta	1 Tahun Anggaran	400.000.000	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi yang dimutakhirkan	1 Tahun Anggaran	600.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi yang dimutakhirkan	1 Tahun Anggaran	600.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Penanaman Modal

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masingmasing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs);
- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal;
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal;
- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan.

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020 – 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman

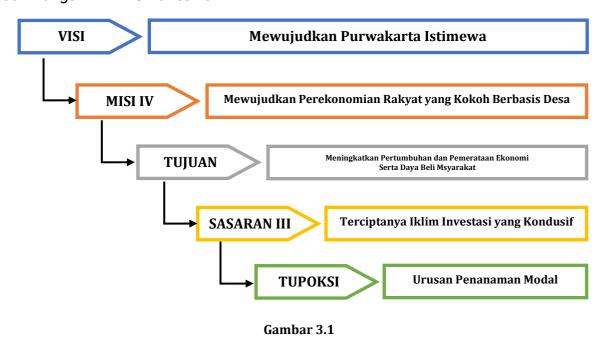
modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja;
- b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal;
- Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
- d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar;
- e. Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor;
- f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar;
- g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah "Mewujudkan Purwakarta Istimewa". Visi tersebut menjadi arah citacita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPTSP adalah Misi Keempat yaitu Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa dengan Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana dapat dilihat dari gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih dengan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPTSP di bawah ini:



Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang

dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan

dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh

DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tertuang dalam dokumen

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 pada Misi Keempat yaitu:

Tujuan: Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif

Indikator Tujuan: Laju pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut DPMPTSP menetapkan sasaran yaitu:

Sasaran Kesatu:

Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Indikator: Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN

Sasaran Kedua:

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 disamping

mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang / Forum Perangkat

Daerah, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;

b. Pencapaian MDGs dan IPM;

c. Perkembangan teknologi informasi;

d. Kebijakan Pusat dan Provinsi;

25

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;

f. Rencana Aksi MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi;

g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah

dan komponen penunjang keberhasilan pembangunan tersebut akan dilaksanakan

melalui Program yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dengan mengacu

kepada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Purwakarta dan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023,

dimana program dan kegiatan Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Jumlah Minat Penanaman Modal.

Kelompok sasaran program : Seluruh pelaku usaha PMA dan PMDN.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program:

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Jumlah Promosi Penanaman Modal dan

Diselenggarakan.

Kelompok sasaran program : Seluruh Masyarakat dan Pelaku Usaha.

26

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program:

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan

Yang Dapat Diselesaikan dan Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Kelompok sasaran : Seluruh Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program:

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Persentase PMA dan PMDN yang Dapat Dimonitoring

Secara Berkala.

Kelompok sasaran : Pelaku Usaha PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program:

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator kinerja program : Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan.

Kelompok sasaran : Seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah.

27

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program:

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja program : Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran.

Kelompok sasaran : Seluruh Unit Kerja di Internal Perangkat Daerah.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dan dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada perubahan Tahun 2021 telah selaras dengan program prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Guna tercapainya target indikator kinerja DPMPTSP, terlampir Rencana Kerja Program dan Kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Matriks Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

			1 17 (Rencana	Tahun 2021		0.1.1		Maju Rencana nun 2022
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					14.274.731.087				15.702.204.196
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.361.675.372	APBD			13.597.842.909
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	52.497.918	APBD		100%	57.747.710
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	29.999.642	APBD		100%	32.999.606

		la dilasta		Rencana	Tahun 2021		Ostatara		Maju Rencana nun 2022
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikato Program/Keg		Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SA Perangkat I Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantora	Daerah, n	100%	7.498.938	APBD		100%	8.248.832
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SA Perangkat I Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantora	Daerah, n	100%	14.999.338	APBD		100%	16.499.272
В	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Capaian SA Perangkat I Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantorai	AKIP Kab.Purwakarta Daerah,	100%	7.249.683.559	APBD		100%	7.974.651.915
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SA Perangkat I Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantora	AKIP Kab.Purwakarta Daerah, n	100%	7.234.686.255	APBD		100%	7.958.154.881

		la dileata u		Rencana	Tahun 2021		Catatan		Maju Rencana nun 2022
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	7.497.689	APBD		100%	8.247.458
3	Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	7.499.615	APBD		100%	8.249.577
С	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	APBD		100%	11.000.000
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	-	APBD		100%	-

			Place and the second		Rencana	Tahun 2021		0.1.1.		Maju Rencana nun 2022
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	-	likator n/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		nuhan njang anan	Kab.Purwakarta	100%	10.000.000	APBD		100%	11.000.000
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		nuhan njang anan	Kab.Purwakarta	100%	374.233.711	APBD		100%	411.657.082
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaia	an SAKIP gkat Daerah, ntase nuhan njang anan	Kab.Purwakarta	100%	174.233.711	APBD		100%	191.657.082
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaia	an SAKIP gkat Daerah, ntase nuhan njang anan	Kab.Purwakarta	100%	200.000.000	APBD		100%	220.000.000

		1. 27. 1		Rencana	Tahun 2021		0.1.1.		Maju Rencana nun 2022
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	624.977.413	APBD		100%	687.475.154
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	58.780.334	APBD		100%	64.658.367
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	43.563.152	APBD		100%	47.919.467
3	Penyediaan BahanLogistik Kantor(Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	315.897.254	APBD		100%	347.486.979

	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	la dilata		Rencana	Tahun 2021		0-1-1-		Maju Rencana nun 2022
No.		Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	87.514.599	APBD		100%	96.266.059
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	6.000.000	APBD		100%	6.600.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	50.000.000	APBD		100%	55.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	50.114.000	APBD		100%	55.125.400

		la dilenta a		Rencana	Tahun 2021		Cototo		Maju Rencana un 2022
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	13.108.074	APBD		100%	14.418.881
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	202.000.000	APBD		100%	222.200.000
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	-	APBD		100%	-
2	Pengadaan Mebel(Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	151.750.000	APBD		100%	166.925.000

		lia dilia da a		Rencana	Tahun 2021		Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	Target	Pagu Indikatif
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	50.250.000	APBD		100%	55.275.000
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	2.306.022.771	APBD		100%	2.536.625.048
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	6.600.000	APBD		100%	7.260.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	614.198.870	APBD		100%	675.618.757

			Indikator		Rencana	Tahun 2021		Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Program/Kegiatan		Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	Target	Pagu Indikatif
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	1.685.223.901	APBD		100%	1.853.746.291
Н	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	1.542.260.000	APBD		100%	1.696.486.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	156.750.000	APBD		100%	172.425.000
2	Pemeliharaan Mebel(Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintu)		Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	-	APBD		100%	-

		Indikator		Rencana	Tahun 2021		Catatan		Maju Rencana nun 2022
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	Target	Pagu Indikatif
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	75.010.000	APBD		100%	82.511.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	600.000.000	APBD		100%	660.000.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Kab.Purwakarta	100%	710.500.000	APBD		100%	781.550.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				424.996.760	APBD			467.496.436
A	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9 Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100%	349.999.912	APBD		100%	384.999.903

					Rencana	Tahun 2021		0.1.1		Maju Rencana nun 2022
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100%	349.999.912	APBD		100%	384.999.903
В	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10	Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100%	74.996.848	APBD		100%	82.496.533
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Minat Penanaman Modal	Kab.Purwakarta	100%	74.996.848	APBD		100%	82.496.533
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					135.118.902	APBD			148.630.792
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100%	135.118.902	APBD		100%	148.630.792
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100%	49.997.684	APBD		100%	54.997.452
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kab.Purwakarta	100%	85.121.218	APBD		100%	93.633.340
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					349.814.362	APBD			384.795.798

		la d'Unite		Rencana	Tahun 2021		Coheter	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
A	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	349.814.362	APBD		100%	384.795.798
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	179.814.838	APBD		100%	197.796.322
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan Nilai Pencapaian IndeksKepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	60.690.536	APBD		100%	66.759.590
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	91.395.185	APBD		100%	100.534.704

		Indikator			Rencana	Tahun 2021		0-1-1		Maju Rencana iun 2022
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan; Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab.Purwakarta	100%	17.913.803	APBD		100%	19.705.183
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					403.129.046	APBD			443.441.951
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	403.129.046	APBD		100%	443.441.951
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	50.819.783	DAK		100%	55.901.761
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	227.261.944	DAK		100%	249.988.138
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	Kab.Purwakarta	100%	125.047.319	DAK		100%	137.552.051

		Indikator			Rencana	Tahun 2021		0-1-1-	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
No.	Bidang Urusan/ Program/Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					599.996.645	APBD			659.996.310
A	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100%	599.996.645	APBD		100%	659.996.310
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	Kab.Purwakarta	100%	599.996.645	APBD		100%	659.996.310

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021. Pencapaian atas Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dalam meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN tercapai 116% dan dalam meningkatnya kualitas pelayanan perizinan tercapai 104%, namun ada beberapa elemen dalam indikator tersebut yang belum maksimal. Untuk itu perlu adanya evaluasi atas hasil capaian indikator tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan calon investor di Kabupaten Purwkarta.

Komitmen dan dukungan dari seluruh pihak di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta guna terwujudnya sinergitas kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan diatasnya. Harapan kami semoga Renja Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

KABUPATEN PURWAKAKTA

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM

NIP. 19731102 199901 1 001

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021. Pencapaian atas Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dalam meningkatnya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN tercapai 116% dan dalam meningkatnya kualitas pelayanan perizinan tercapai 104%, namun ada beberapa elemen dalam indikator tersebut yang belum maksimal. Untuk itu perlu adanya evaluasi atas hasil capaian indikator tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan calon investor di Kabupaten Purwakarta.

Komitmen dan dukungan dari seluruh pihak di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta sangat diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta guna terwujudnya sinergitas kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan diatasnya. Harapan kami semoga Renja Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan *good governance* dan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Januari 2021 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP. 19731102 199901 1 001